ABSTRAK

Penelitian ini meneliti pengaruh partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah. Pengertian pengawasan keuangan daerah adalah tindakan untuk menjamin agar pengumpulan penerimaan-penerimaan daerah dan penyaluran pengeluaran-pengeluaran daerah tidak menyimpang dari rencana yang telah digariskan dalam anggaran.

Dalam penelitian ini mengambil sampel anggota DPRD Provinsi Banten, dengan menggunakan kuesioner yang kemudian dianalisis menggunakan regresi berganda. Hasil pengujian menunjukkan bahwa pengetahuan anggaran berpengaruh positif terhadap pengawasan keuangan daerah, kedua interaksi pengetahuan anggaran dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap pengawasan keuangan daerah, dan ketiga interaksi pengetahuan anggaran dan transparansi kebijakan publik berpengaruh tidak positif terhadap pengawasan keuangan daerah. Hasil pengujian ini sesuai dengan keadaan yang terjadi di provinsi Banten saat ini.

Kata kunci : Pengawasan keuangan daerah (APBD), pengetahuan anggaran, partisipasi masyarakat, transparansi kebijakan publik.